



Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Firdaus

Universitas Riau, Indonesia

Email: firdaus20@guru.sd.belajar.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator dalam peningkatan mutu pendidikan di tiga SD Negeri di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 18 informan (kepala sekolah, komite, guru senior, orang tua). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi; dianalisis dengan model interaktif Miles Huberman serta triangulasi sumber/teknik/waktu. Hasil menunjukkan: (1) Advisory efektif bila komite dilibatkan sejak perencanaan dan usulannya spesifik serta ditindaklanjuti dalam RKS; (2) Supporting berdampak ketika dukungan menempel pada kebutuhan inti pembelajaran dan berkelanjutan; (3) Controlling kuat jika ada akses data, sesi tanya jawab bermakna, bukti dukung, dan tindak lanjut tertulis; (4) Mediating berhasil bila kanal komunikasi dua arah aktif dan respons cepat. Dampak awal tampak pada iklim belajar yang lebih kondusif, kepercayaan orang tua meningkat, dan arah program lebih jelas; pengaruh pada capaian akademik muncul bertahap. Perlunya penguatan kapasitas komite, desain forum deliberatif, dan protokol tindak lanjut seperti penanggung jawab, jadwal, indikator keberhasilan.

Kata kunci: *Komite Sekolah, Peran Komite Sekolah, Kualitas Pendidikan, Sekolah Dasar, Daerah Pedesaan.*

Abstract

This study examines how school committees act as advisory, supporting, controlling, and mediating bodies to improve education quality in three public primary schools in Desa Karya Indah, Tapung. A descriptive qualitative design was employed with 18 informants (principals, committee members, senior teachers, parents). Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles Huberman interactive model with source/technique/time triangulation. Findings indicate that: (1) Advisory works when committees are engaged early in planning and provide specific proposals that are formalized in the school work plan; (2) Supporting is effective when assistance targets core classroom needs and is sustained; (3) Controlling strengthens accountability when data are open, Q&A is substantive, evidence is checked, and written follow-up is recorded; (4) Mediating succeeds when two-way channels are active and responses are timely. Immediate effects appear as a more conducive learning climate, higher parental trust, and clearer program direction, while academic gains emerge gradually. Recommendations include capacity building for committees, deliberative meeting design, and follow-up protocols responsible person, timeline, indicators.

Keywords:

School Committee, Committee Roles, Education Quality, Primary School, Rural Area.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan peradaban suatu bangsa (Adisaputro, 2020). Melalui pendidikan yang bermutu, manusia dibentuk secara intelektual, moral, dan sosial sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional (Rosnani, 2021). Dalam konteks tersebut, sekolah sebagai lembaga formal memiliki posisi strategis dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas (Mursalim & Tech, 2019). Kualitas ini hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah yang berperan besar dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan (Amerta et al., 2015).

Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk untuk memberikan dukungan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di satuan pendidikan (Nurafni et al., 2022). Landasan hukum keberadaan komite sekolah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 ayat (3), yang menegaskan bahwa komite sekolah berperan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan terhadap proses pendidikan (Agista, 2019). Melalui Kepmendiknas No. 044/U/2002, peran tersebut diperjelas, yakni sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator antara sekolah dan masyarakat (Hariyani, 2016).

Menurut Kemendikbud, kemitraan antara sekolah dan komite bertujuan memperkuat hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan potensi peserta didik (Anwar, 2022). Komite sekolah berfungsi sebagai perwakilan orang tua, guru, dan masyarakat yang membantu menjembatani komunikasi, menyampaikan aspirasi, serta memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan (Jamaluddin, 2022). Pada tingkat provinsi, komite sekolah bahkan memiliki peran yang lebih luas dalam pengawasan alokasi anggaran, perencanaan strategis, serta pemantauan standar pendidikan antarwilayah (Dewi et al., 2025).

Namun, secara praktis, peran komite sekolah masih menghadapi berbagai kendala (Ansori & Sinaga, 2025). Banyak satuan pendidikan dasar, terutama di daerah, belum memaksimalkan fungsi komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan (Damanik, 2019). Permasalahan ini mencakup minimnya komunikasi antara komite dan sekolah, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pemahaman anggota komite terhadap tugas dan tanggung jawabnya (Winoto, 2021). Akibatnya, fungsi-fungsi strategis komite dalam manajemen berbasis sekolah belum berjalan optimal (Seriyantri et al., 2021).

Situasi tersebut juga terlihat di SDN Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, di mana komite sekolah belum menunjukkan kinerja yang memadai (Harahap, 2023). Partisipasi dalam perencanaan program sekolah masih rendah, dukungan sarana prasarana belum optimal, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan sekolah belum berjalan dengan baik (Randan et al., 2025). Sekolah ini bahkan menunjukkan kualitas layanan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan sekolah-sekolah swasta di Kabupaten Kampar (Priyatna, 2022). Observasi awal menunjukkan bahwa hubungan antara sekolah dan komite masih bersifat formalitas, sehingga peran komite belum berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran (Sari et al., 2024).

Temuan ini selaras dengan penelitian Hanafi & Ma'sum (2015), yang menunjukkan bahwa komite sekolah cukup aktif dalam memberikan pertimbangan dan dukungan, namun masih lemah dalam aspek pengawasan dan mediasi. Penelitian Ramadhan & Torro (2022) juga menggarisbawahi rendahnya partisipasi orang tua serta kurangnya dukungan finansial masyarakat sebagai kendala utama dalam pelaksanaan program sekolah. Sementara itu, Zubaedi (2023) menekankan bahwa komite sekolah kerap diposisikan hanya sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, penguatan peran komite sekolah sejalan dengan agenda desentralisasi pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 17 Tahun 2010 (Hendarman et al., 2018). Komite seharusnya

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

menjadi mitra sejajar yang mampu memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah (Bisri, 2020). Kajian mengenai komite sekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar pada wilayah pedesaan, masih relatif terbatas sehingga menimbulkan research gap (Alfian et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mendeskripsikan secara mendalam peran komite sekolah dan kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Penelitian ini berupaya menawarkan model keterlibatan komite sekolah berbasis penguatan jejaring sosial masyarakat, edukasi manajerial, serta perbaikan budaya komunikasi antara sekolah dan orang tua. Komite sekolah diharapkan mampu menyusun perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi program pendidikan secara efektif untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur yang telah dipaparkan, penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, yang mencakup peran komite sebagai pemberi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, bentuk dukungan yang diberikan dalam penyediaan sumber daya, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan, perannya sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat, serta dampak keterlibatan komite terhadap mutu pembelajaran dan suasana sekolah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan kebijakan, menganalisis dukungan komite dalam menyediakan sumber daya finansial, material, pemikiran, maupun tenaga, mengkaji efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan komite terhadap akuntabilitas layanan pendidikan, menguraikan bagaimana komite menjembatani hubungan sekolah dan orang tua untuk meningkatkan mutu pendidikan, serta menganalisis dampak keterlibatan komite terhadap kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu mengenai peran komite sekolah, partisipasi orang tua, dan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar sekaligus memperkuat pemahaman hubungan di antara ketiganya sebagai faktor penting dalam peningkatan hasil belajar siswa, serta menyediakan bukti empiris untuk mendukung pengembangan kebijakan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, antara lain sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas peran komite sekolah, memperkuat partisipasi orang tua siswa, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, membantu pengambil kebijakan merumuskan kebijakan yang relevan, mendukung sekolah dalam mengembangkan program peningkatan mutu, membantu guru dalam memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, serta memberikan pemahaman bagi orang tua mengenai bentuk partisipasi yang efektif dalam pendidikan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan secara mendalam realitas sosial mengenai peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Moleong (2017) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dalam konteks alami melalui data berupa kata-kata, tindakan, dan dokumentasi.

Peneliti terlibat langsung sebagai instrumen utama yang berinteraksi dengan informan di lapangan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang dinamika yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami kondisi objektif dan subjektif individu atau kelompok melalui teknik triangulasi, pengambilan sampel secara purposive, dan analisis induktif. Oleh karena itu, peneliti menggali data secara langsung dari kepala sekolah, guru, dan komite sekolah melalui wawancara dan observasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendeskripsikan secara rinci peran komite sebagai pemberi pertimbangan, pendukung kegiatan, pengawas program, dan mediator antara sekolah dan masyarakat.

Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi fenomena sosial, bukan pengujian hipotesis atau pengukuran variabel. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami interaksi antara komite sekolah, kepala sekolah, guru, serta masyarakat secara mendalam. Selain itu, perspektif subjektif para informan dapat ditangkap untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang berpengaruh terhadap implementasi peran komite sekolah di tingkat dasar.

Pendekatan kualitatif ini juga digunakan untuk menelaah pandangan, pengalaman, dan bentuk keterlibatan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Fokus penelitian tidak pada angka statistik, tetapi pada makna dan pola hubungan antaraktor pendidikan. Melalui eksplorasi mendalam, peneliti berupaya mengidentifikasi kontribusi konkret komite sekolah serta kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran utuh tentang efektivitas komite sekolah dalam konteks partisipasi masyarakat. Sebagai kerangka analisis, penelitian ini menerapkan model Input–Process–Output (IPO) untuk mengorganisir data kualitatif secara sistematis. Pada tahap input, peneliti menelaah latar belakang komite sekolah, kebijakan pelibatan masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta dukungan kepala sekolah. Pada tahap proses, peneliti mengkaji pelaksanaan peran komite dalam fungsi advisory, supporting, controlling, dan mediating, termasuk pola interaksi dengan guru, orang tua, serta mekanisme koordinasi sekolah. Sementara itu, tahap output berfokus pada perubahan kualitas pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, serta dampak terhadap sarana-prasarana dan kepuasan orang tua.

Penelitian dilaksanakan di tiga Sekolah Dasar Negeri di Desa Karya Indah—SDN 037, SDN 036, dan SDN 044—yang dipilih karena merepresentasikan konteks wilayah rural dengan tantangan khas dalam penguatan peran komite sekolah. Penelitian berlangsung selama 5–6 bulan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, penulisan draf laporan, konfirmasi hasil kepada sekolah, seminar hasil penelitian, hingga finalisasi laporan. Tahapan ini memberikan waktu yang cukup bagi peneliti untuk melakukan observasi mendalam dan verifikasi data secara berkelanjutan.

Informan penelitian mencakup kepala sekolah sebagai informan kunci, ketua dan anggota komite sekolah serta guru senior sebagai informan utama, dan orang tua siswa sebagai informan tambahan. Pembagian ini didasarkan pada tingkat pengetahuan dan keterlibatan informan terhadap isu yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan secara purposive agar data yang diperoleh relevan, akurat, dan mencerminkan realitas pelaksanaan peran komite sekolah di ketiga unit sekolah tersebut.

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terbuka, observasi langsung maupun tidak langsung, serta telaah dokumentasi terhadap dokumen sekolah seperti RKS, laporan komite, dan notulen rapat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Keabsahan data dijaga melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member check kepada informan. Melalui proses ini, peneliti memastikan bahwa temuan yang diperoleh kredibel, akurat, dan benar-benar mencerminkan kondisi peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Karya Indah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tiga Sekolah Dasar Negeri di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung—UPT SDN 037, UPT SDN 036, dan UPT SDN 044—yang dipilih karena dianggap mewakili karakteristik pendidikan dasar di wilayah pedesaan dengan tantangan beragam dalam optimalisasi peran komite sekolah. Penelitian berlangsung pada Agustus–September 2025 dan melibatkan 18 informan yang terdiri atas kepala sekolah, ketua serta anggota komite sekolah, guru senior, dan orang tua/wali murid. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta telaah dokumentasi, dengan fokus pada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator dalam berbagai kegiatan formal seperti rapat komite, penyusunan Rencana Kerja Sekolah, serta evaluasi program. Data berupa notulen, laporan BOS, dan arsip kegiatan komite dianalisis bersama hasil wawancara dan observasi menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Pengumpulan data di UPT SDN 037 dilakukan pada 27–30 Agustus 2025, menunjukkan kondisi sekolah yang kondusif dengan komite yang cukup aktif dalam rapat dan perencanaan program; sementara di UPT SDN 036, data dihimpun pada 2–3 September 2025 melalui observasi forum pelaporan program, wawancara, dan telaah dokumen yang menggambarkan pola koordinasi sekolah–komite yang terjadwal dan komunikasi formal dengan orang tua; kemudian di UPT SDN 044, penelitian berlangsung pada 4–5 September 2025, dan sekolah yang memiliki akreditasi A ini menyediakan data melalui observasi rapat BOS, wawancara, serta peninjauan arsip operasional, dengan fokus pengamatan pada keterlibatan komite dalam pengawasan, dukungan, dan mediasi. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik nyata peran komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Desa Karya Indah.

Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan

Salah satu fungsi utama komite sekolah menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 adalah sebagai advisory agency, yakni pemberi pertimbangan bagi sekolah dalam pengambilan keputusan. Peran ini mencakup keterlibatan komite dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah, perumusan kebijakan prioritas, serta masukan terkait kurikulum, sarana prasarana, dan program pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan fungsi advisory berbeda antar sekolah di Desa Karya Indah. Pada UPT SDN 037, komite berperan substantif karena dilibatkan sejak tahap awal perencanaan dan memberikan masukan yang spesifik serta diakomodasi ke dalam program sekolah. Di UPT SDN 036, peran advisory hadir secara moderat, masukan diberikan namun masih bersifat umum dan tidak sepenuhnya terhubung dengan indikator proses pembelajaran. Sementara itu, di UPT SDN 044, peran komite cenderung prosedural karena rapat berlangsung

formalitas, masukan jarang ditindaklanjuti, dan kepala sekolah cenderung menyusun program secara internal.

Data wawancara, observasi rapat perencanaan, dan telaah dokumentasi menguatkan perbedaan kualitas advisory tersebut. Di UPT SDN 037, kepala sekolah, komite, guru, dan orang tua sama-sama mengonfirmasi bahwa masukan komite terhubung langsung dengan kebutuhan kelas seperti perbaikan ruang, pengadaan buku, dan peningkatan fasilitas belajar; hal ini memperlihatkan proses deliberatif yang kuat dan menghasilkan keputusan yang berdampak. Di UPT SDN 036, komite hadir dalam rapat dan memberikan persetujuan, namun keterbatasan literasi teknis mengurangi kedalaman argumentasi sehingga fungsi advisory hanya membantu pada level prioritas umum. Sebaliknya, UPT SDN 044 menunjukkan lemahnya mekanisme tindak lanjut sehingga masukan komite tidak berubah menjadi keputusan operasional; guru dan orang tua juga belum melihat dampak nyata terhadap pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan advisory bukan hanya soal kehadiran komite, tetapi kualitas dialog, kemampuan berargumentasi, serta konsistensi implementasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan terbentang dari prosedural, moderat, hingga substantif, dengan UPT SDN 037 menunjukkan praktik terbaik karena pelibatan sejak tahap perencanaan, masukan yang spesifik pada kebutuhan inti pembelajaran, dan jejak keputusan yang jelas hingga implementasi. Perbedaan efektivitas ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kapasitas komite dalam memahami kebutuhan pendidikan dan menyampaikan argumen kebijakan, keterbukaan kepala sekolah dalam menyediakan ruang deliberatif, serta keberadaan mekanisme tindak lanjut yang operasional seperti notulensi yang mengikat, penetapan penanggung jawab, tenggat, dan indikator keberhasilan. Dalam kerangka IPO, kualitas input dan proses tersebut menghasilkan output berupa prasyarat mutu yang lebih baik, komunikasi kebijakan yang lebih jelas, dan kepercayaan orang tua yang meningkat. Temuan ini menegaskan bahwa fungsi advisory komite baru menjadi bermakna ketika komite memiliki kapasitas, ruang dialog, dan sistem tindak lanjut yang memungkinkan partisipasi berubah menjadi pertimbangan kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan kualitas pendidikan.

Dukungan Komite Sekolah terhadap Mutu Pendidikan

Selain menjalankan fungsi pemberi pertimbangan, komite sekolah juga berperan sebagai supporting agency yang memberikan dukungan bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu melalui bantuan finansial, pengadaan sarana prasarana, partisipasi dalam kegiatan sekolah, dan motivasi bagi guru, siswa, serta orang tua. Peran pendukung ini menjadi sangat penting karena sekolah dasar di wilayah pedesaan umumnya menghadapi keterbatasan sumber daya, sehingga kontribusi komite dapat menjadi penopang utama berjalannya kegiatan pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas dukungan komite berbeda di masing-masing sekolah. Di UPT SDN 037 Desa Karya Indah, komite memberikan dukungan material seperti perbaikan pagar, pengadaan kipas, buku bacaan, serta dukungan sosial dengan menggerakkan orang tua untuk peduli terhadap lingkungan belajar. Pola dukungan ini terhubung langsung dengan kebutuhan inti pembelajaran sehingga menghasilkan dampak yang nyata pada suasana kelas dan motivasi belajar siswa. Sementara itu, di UPT SDN 036 Desa Karya Indah, dukungan komite hadir tetapi belum konsisten, bersifat mengikuti momentum program dan kegiatan tertentu seperti alat tulis dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga dampaknya terbatas pada kelancaran kegiatan dan komunikasi program. Adapun di UPT SDN 044 Desa Karya Indah, dukungan komite cenderung reaktif dan insidental, seperti bantuan konsumsi dan transportasi saat lomba, dengan realisasi

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

perbaikan fasilitas yang lambat sehingga kontribusinya terhadap kualitas pembelajaran masih minim.

Wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi menunjukkan bahwa efektivitas peran pendukung sangat dipengaruhi oleh konsistensi keterlibatan komite dalam kegiatan sekolah. Di UPT SDN 037, dukungan komite yang terencana dan responsif terlihat melalui kemampuannya menghadirkan solusi konkret, baik melalui jejaring donatur lokal maupun pergerakan orang tua dalam memenuhi kebutuhan ruang kelas, yang kemudian berpengaruh positif terhadap kenyamanan proses belajar. Guru dan orang tua di sekolah ini mengonfirmasi dampak langsung berupa suasana kelas yang lebih kondusif dan motivasi belajar siswa yang meningkat. Sebaliknya, di UPT SDN 036, dukungan komite dirasakan membantu kelancaran program namun belum sepenuhnya menyasar kebutuhan inti pembelajaran karena keterlibatan komite belum berkelanjutan. Pada UPT SDN 044, dukungan komite terhambat oleh persepsi masyarakat terkait penggalangan dana yang dianggap sensitif, keterbatasan kapasitas komite, serta lemahnya mekanisme tindak lanjut, sehingga dukungan yang diberikan lebih bersifat sementara dan tidak berdampak jangka panjang terhadap mutu layanan pembelajaran.

Secara keseluruhan, temuan penelitian mengungkap bahwa pola dukungan komite sekolah di Desa Karya Indah membentang dari dukungan yang substantif dan berkelanjutan hingga dukungan yang insidental dan terbatas. Perbedaan efektivitas ini terutama ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kapasitas komite dalam membaca kebutuhan kelas dan mengonversinya menjadi usulan yang realistis, keterbukaan kepemimpinan sekolah dalam menyediakan ruang dialog dan menindaklanjuti usulan menjadi program yang operasional, serta ketersediaan sumber daya dan jejaring sosial yang dapat dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dalam konteks UPT SDN di Desa Karya Indah, komite memberikan dampak terbesar ketika dukungannya terhubung langsung ke kebutuhan inti pembelajaran, bersifat berkelanjutan, serta didukung mekanisme tindak lanjut yang jelas. Tanpa tiga prasyarat tersebut, peran supporting komite cenderung berhenti sebagai dukungan acara atau simbolis yang sulit menghasilkan peningkatan kualitas proses belajar secara konsisten.

Peran Komite Sekolah dalam Melakukan Pengawasan

Fungsi komite sekolah sebagai controlling agency sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan melalui pengawasan terhadap perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga penggunaan anggaran seperti dana BOS. Dalam penelitian ini, efektivitas fungsi pengawasan dianalisis melalui keterlibatan komite pada rapat pertanggungjawaban anggaran, forum evaluasi program, serta interaksinya dengan guru dan orang tua. Temuan menunjukkan bahwa di UPT SDN 037 Desa Karya Indah, fungsi pengawasan berjalan secara substantif karena komite aktif bertanya, meminta rincian biaya, meninjau bukti dukung, dan menunda persetujuan laporan ketika penjelasan belum memadai. Praktik ini menghasilkan pola kontrol yang operasional serta memperkuat akuntabilitas sekolah. Sebaliknya, di UPT SDN 036 Desa Karya Indah, pengawasan komite hadir namun masih bersifat administratif; mereka menerima laporan, memantau secara umum, tetapi belum memiliki daya kritis atau pemahaman teknis anggaran yang kuat. Sementara itu, di UPT SDN 044 Desa Karya Indah, pengawasan dominan bersifat prosedural karena komite hanya mendengarkan laporan tanpa dialog mendalam, sementara klarifikasi yang diminta sering mendapat tindak lanjut yang lambat.

Hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh literasi finansial komite serta keterbukaan pihak sekolah dalam menyediakan ruang evaluasi. Di UPT SDN 037, kolaborasi kepala sekolah dan komite menghasilkan forum tanya jawab yang hidup, pembahasan rinci tiap item anggaran, serta adanya dokumentasi keputusan yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komite

mampu menjalankan fungsi kontrol secara aktif, sehingga mendorong transparansi dan kepercayaan publik. Di UPT SDN 036, pengawasan tetap terjadi namun terbatas karena komite lebih banyak menerima paparan tanpa analisis mendalam, dan guru mengonfirmasi bahwa pertanyaan yang muncul biasanya bersifat umum. Di UPT SDN 044, keterbatasan literasi komite, forum yang formalistik, dan keterlambatan tindak lanjut menghambat pengawasan, sehingga komite sulit memainkan fungsi kontrol yang bermakna. Perbedaan ini berpengaruh pada bagaimana orang tua menilai peran komite: di SDN 037, orang tua merasakan ketenangan karena mengetahui komite mengawasi penggunaan dana, sedangkan di SDN 044 peran komite hampir tidak terlihat sehingga orang tua lebih sering menyampaikan aspirasi langsung kepada guru.

Secara keseluruhan, kualitas pengawasan komite sekolah di Desa Karya Indah menunjukkan adanya gradasi dari yang substantif hingga yang bersifat simbolis. Pengawasan substantif—yang tampak pada UPT SDN 037—hadir ketika komite memiliki literasi yang memadai tentang anggaran dan indikator program, kepala sekolah membuka ruang dialog yang sehat, serta terdapat mekanisme umpan balik berupa klarifikasi tertulis, penanggung jawab, dan jadwal tindak lanjut. Pengawasan moderat di UPT SDN 036 lebih bercorak administratif dengan ketergantungan besar pada penjelasan pihak sekolah, sedangkan UPT SDN 044 menghadirkan pola pengawasan prosedural karena minimnya pemahaman, ruang evaluasi yang sempit, dan lambatnya tindak lanjut. Ketiga faktor tersebut—kapasitas komite, keterbukaan sekolah, serta sistem tindak lanjut—menjadi determinan utama efektivitas fungsi controlling. Dengan terpenuhinya ketiga syarat itu, pengawasan komite tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan efektivitas dan efisiensi program pendidikan sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan dasar.

Peran Komite Sekolah sebagai Mediator antara Sekolah dan Masyarakat

Komite sekolah menjalankan fungsi sebagai mediating agency, yaitu jembatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat, yang sangat penting untuk memastikan dukungan orang tua serta terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang harmonis. Dalam penelitian ini, efektivitas fungsi mediasi ditelusuri melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite, serta orang tua, serta observasi terhadap dinamika komunikasi baik dalam rapat formal maupun interaksi sehari-hari. Temuan menunjukkan bahwa di UPT SDN 037 Desa Karya Indah, peran mediasi berjalan aktif dan dua arah, di mana komite menampung aspirasi orang tua melalui grup pesan dan pertemuan, lalu menyampaikannya kepada sekolah, serta sebaliknya membantu menjelaskan kebijakan sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komite juga menangani keluhan dengan cepat, menghasilkan penyelesaian masalah yang konkret dan suasana belajar yang lebih kondusif. Pola ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga mekanisme penyelesaian masalah yang mendorong stabilitas hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Berbeda dari SDN 037, pelaksanaan fungsi mediasi di UPT SDN 036 Desa Karya Indah berjalan namun belum optimal. Komite berperan sebagai penerus informasi dari sekolah kepada orang tua dan sesekali menyampaikan aspirasi melalui rapat, tetapi belum menjadi saluran utama dalam menyelesaikan persoalan karena sebagian besar orang tua tetap memilih langsung berkomunikasi dengan guru. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kanal komunikasi tersedia, intensitas dan kedalaman mediasi masih terbatas karena pesan yang disampaikan bersifat umum dan belum dilengkapi mekanisme tindak lanjut yang sistematis. Hal ini juga terlihat dari pernyataan kepala sekolah yang menilai bahwa fungsi mediasi komite perlu ditingkatkan agar alur informasi dapat lebih cepat dan jelas. Dengan kondisi demikian, komite terlihat hadir dalam struktur, tetapi belum sepenuhnya memainkan peran strategis dalam memediasi hubungan sekolah–masyarakat.

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Di UPT SDN 044 Desa Karya Indah, fungsi mediasi komite cenderung pasif dan prosedural. Meskipun komite berupaya menyampaikan aspirasi orang tua, tindak lanjut dari pihak sekolah sering lambat sehingga komite dinilai kurang efektif oleh masyarakat. Guru juga menyatakan bahwa komunikasi sering berhenti di rapat dan tidak berlanjut pada koordinasi yang produktif, sehingga informasi berulang kali harus disampaikan langsung oleh guru kepada orang tua. Kondisi ini menyebabkan orang tua cenderung melewati komite ketika menghadapi masalah, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi komite sebagai jembatan komunikasi. Secara keseluruhan, perbedaan efektivitas mediasi pada ketiga sekolah dipengaruhi oleh tiga faktor utama: ketersediaan kanal komunikasi yang mudah diakses, kecepatan dan kejelasan tindak lanjut sekolah atas aspirasi yang dibawa komite, serta konsistensi komite dalam menghasilkan solusi nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi baru akan berdampak ketika komunikasi berjalan dua arah, respons cepat diberikan, dan komite dipercaya sebagai representasi masyarakat dalam menjaga hubungan sekolah-orang tua tetap harmonis dan berorientasi pada mutu pendidikan.

Dampak Keterlibatan Komite Sekolah terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Suasana Sekolah

Komite sekolah menjalankan fungsi sebagai mediating agency, yaitu jembatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat, yang sangat penting untuk memastikan dukungan orang tua serta terciptanya penyelenggaraan pendidikan yang harmonis. Dalam penelitian ini, efektivitas fungsi mediasi ditelusuri melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, komite, serta orang tua, serta observasi terhadap dinamika komunikasi baik dalam rapat formal maupun interaksi sehari-hari. Temuan menunjukkan bahwa di UPT SDN 037 Desa Karya Indah, peran mediasi berjalan aktif dan dua arah, di mana komite menampung aspirasi orang tua melalui grup pesan dan pertemuan, lalu menyampaikannya kepada sekolah, serta sebaliknya membantu menjelaskan kebijakan sekolah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komite juga menangani keluhan dengan cepat, menghasilkan penyelesaian masalah yang konkret dan suasana belajar yang lebih kondusif. Pola ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga mekanisme penyelesaian masalah yang mendorong stabilitas hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Berbeda dari SDN 037, pelaksanaan fungsi mediasi di UPT SDN 036 Desa Karya Indah berjalan namun belum optimal. Komite berperan sebagai penerus informasi dari sekolah kepada orang tua dan sesekali menyampaikan aspirasi melalui rapat, tetapi belum menjadi saluran utama dalam menyelesaikan persoalan karena sebagian besar orang tua tetap memilih langsung berkomunikasi dengan guru. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kanal komunikasi tersedia, intensitas dan kedalaman mediasi masih terbatas karena pesan yang disampaikan bersifat umum dan belum dilengkapi mekanisme tindak lanjut yang sistematis. Hal ini juga terlihat dari pernyataan kepala sekolah yang menilai bahwa fungsi mediasi komite perlu ditingkatkan agar alur informasi dapat lebih cepat dan jelas. Dengan kondisi demikian, komite terlihat hadir dalam struktur, tetapi belum sepenuhnya memainkan peran strategis dalam memediasi hubungan sekolah-masyarakat.

Di UPT SDN 044 Desa Karya Indah, fungsi mediasi komite cenderung pasif dan prosedural. Meskipun komite berupaya menyampaikan aspirasi orang tua, tindak lanjut dari pihak sekolah sering lambat sehingga komite dinilai kurang efektif oleh masyarakat. Guru juga menyatakan bahwa komunikasi sering berhenti di rapat dan tidak berlanjut pada koordinasi yang produktif, sehingga informasi berulang kali harus disampaikan langsung oleh guru kepada orang tua. Kondisi ini menyebabkan orang tua cenderung melewati komite ketika menghadapi masalah, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi komite sebagai jembatan komunikasi. Secara keseluruhan, perbedaan efektivitas mediasi pada ketiga sekolah dipengaruhi oleh tiga faktor utama: ketersediaan kanal komunikasi yang mudah

diakses, kecepatan dan kejelasan tindak lanjut sekolah atas aspirasi yang dibawa komite, serta konsistensi komite dalam menghasilkan solusi nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi baru akan berdampak ketika komunikasi berjalan dua arah, respons cepat diberikan, dan komite dipercaya sebagai representasi masyarakat dalam menjaga hubungan sekolah-orang tua tetap harmonis dan berorientasi pada mutu pendidikan.

Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan merupakan salah satu fungsi yang paling strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Komite diharapkan memberikan masukan yang konstruktif dan relevan bagi proses pengambilan keputusan di sekolah, mulai dari penyusunan program kerja, perencanaan kebijakan, hingga usulan prioritas kebutuhan pembelajaran. Keterlibatan ini mencerminkan upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya orang tua siswa, sehingga kebijakan yang ditetapkan sekolah tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata di kelas. Dalam konteks ini, komite memainkan fungsi strategis untuk menjembatani kebutuhan siswa dan masyarakat dengan arah kebijakan sekolah.

Dalam teori Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), komite sekolah merupakan pemangku kepentingan utama yang harus terlibat dalam seluruh tahapan perencanaan pendidikan, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS), evaluasi program, hingga penetapan prioritas anggaran. Partisipasi yang aktif terbukti meningkatkan relevansi kebijakan, karena keputusan dibuat berdasarkan kebutuhan lokal. Penelitian Haryanto (2020) menunjukkan bahwa komite yang terlibat secara substansial mampu mendorong perubahan nyata, seperti perbaikan sarana, pengadaan buku, atau penataan ruang kelas. Sebaliknya, penelitian Anwar & Rosyid (2019) dan Fitriani & Hidayati (2021) menemukan bahwa di sekolah-sekolah dengan tingkat partisipasi rendah, komite hanya berfungsi sebagai pemberi persetujuan tanpa diskusi bermakna, sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Implementasi fungsi pemberi pertimbangan komite sekolah menunjukkan variasi yang signifikan antar sekolah. Di sekolah yang memberikan ruang dialog luas, komite dapat menyampaikan masukan berbobot, mendampingi penyusunan prioritas kegiatan, dan memastikan keputusan sesuai kebutuhan kelas. Dalam kasus tertentu, komite bahkan berperan dalam menentukan arah penggunaan dana BOS agar lebih efektif. Namun, pada konteks lain, fungsi ini terhambat oleh minimnya kompetensi anggota komite atau terbatasnya akses informasi yang diberikan oleh sekolah. Tantangan seperti kurangnya pelatihan, rendahnya literasi kebijakan pendidikan, dan budaya partisipasi yang belum kuat menyebabkan peran advisory berhenti pada tingkat formalitas sehingga tidak menghasilkan dampak nyata dalam praktik pembelajaran.

Secara keseluruhan, efektivitas komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan sangat ditentukan oleh dua faktor utama: kualitas diskusi dalam forum perencanaan dan keberanian komite dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Komite yang memiliki pemahaman memadai tentang konteks sekolah mampu memberikan saran yang lebih relevan, terutama terkait pengadaan sarana, alokasi anggaran, dan perumusan prioritas pembelajaran. Untuk memaksimalkan fungsi ini, diperlukan penguatan kapasitas komite melalui pelatihan, peningkatan literasi kebijakan pendidikan, dan pemberian ruang deliberatif yang jelas dalam perencanaan sekolah. Ketika kapasitas komite diperkuat dan mekanisme tindak lanjut berjalan konsisten, peran pemberi pertimbangan akan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah.

Dukungan Komite Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Komite sekolah memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan terhadap mutu pendidikan, mencakup dukungan finansial, sosial, maupun moral. Kontribusi ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran dan suasana sekolah secara keseluruhan. Sebagai lembaga yang terdiri dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, komite memiliki kemampuan memahami kebutuhan lokal sekolah dan memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, penggalangan dana, hingga memotivasi orang tua agar lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Dukungan ini menjadi sangat esensial terutama pada sekolah-sekolah yang menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas, karena kehadiran komite dapat menjadi penopang utama terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang kondusif.

Menurut teori manajemen pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education management*), keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. Dukungan tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga berupa pengawasan, pemberian masukan, serta upaya meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Sejumlah penelitian mendukung hal ini. Zubaedi (2022) menemukan bahwa dukungan komite dalam pengadaan fasilitas seperti buku dan sarana kelas berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Santosa dan Aminah (2021) menegaskan bahwa fasilitas belajar yang memadai meningkatkan kenyamanan siswa dan motivasi belajar. Sementara itu, Hanifah (2019) menunjukkan bahwa ketika orang tua terlibat aktif—dalam bimbingan belajar di rumah maupun kehadiran dalam kegiatan sekolah—motivasi dan pencapaian akademik siswa meningkat. Dengan demikian, dukungan komite yang menyentuh kebutuhan inti pembelajaran memiliki dampak yang lebih dalam dibanding dukungan insidental.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas dukungan komite berbeda antara UPT SDN 037, SDN 036, dan SDN 044 Desa Karya Indah. Di UPT SDN 037, dukungan berjalan efektif karena komite memberikan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan kelas, seperti penyediaan kipas angin, buku bacaan, serta penguatan komunikasi dengan orang tua. Dukungan tersebut terencana, relevan, dan berkelanjutan sehingga berdampak nyata pada kenyamanan belajar siswa. Sebaliknya, di UPT SDN 036 dukungan masih bersifat sporadis, lebih banyak terfokus pada kegiatan insidental seperti lomba dan ekstrakurikuler, sehingga dampaknya terhadap pembelajaran harian kurang signifikan. Sementara itu, di UPT SDN 044 dukungan komite relatif terbatas akibat kendala sumber daya dan kurangnya pola dukungan yang terstruktur. Akibatnya, kontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran menjadi minimal.

Secara keseluruhan, dukungan komite sekolah memiliki dampak signifikan bagi mutu pendidikan, terutama di sekolah-sekolah dengan keterbatasan fasilitas. Namun efektivitas dukungan ini sangat bergantung pada konsistensi, relevansi, dan keterarahannya terhadap kebutuhan inti pembelajaran. Dukungan yang terencana dan berulang—meskipun sederhana—lebih memberikan hasil dibanding dukungan besar tetapi insidental. Selain itu, dukungan sosial berupa peningkatan partisipasi orang tua merupakan faktor penting dalam memperkuat motivasi dan prestasi siswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas komite melalui pelatihan, peningkatan literasi pendidikan, serta penyusunan rencana dukungan berbasis kebutuhan kelas yang lebih terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, komite dapat menjalankan perannya secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Peran Komite Sekolah dalam Melakukan Pengawasan

Peran komite sekolah dalam melakukan pengawasan merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program pembelajaran berjalan sesuai standar dan prinsip akuntabilitas. Dalam konteks *good*

governance di bidang pendidikan, pengawasan yang efektif menjadi pilar utama demi terciptanya transparansi dan kualitas pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Komite sekolah sebagai perwakilan orang tua dan masyarakat memiliki posisi strategis untuk melakukan pemantauan dari dekat terhadap implementasi kebijakan sekolah, termasuk mengawasi penggunaan dana BOS, pelaksanaan Rencana Kerja Sekolah (RKS), serta kualitas layanan pembelajaran. Namun, efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada pemahaman komite terhadap kebijakan pendidikan dan kemampuan mereka mengakses informasi relevan.

Pengawasan oleh komite sekolah mencakup pemantauan terhadap penggunaan anggaran, implementasi kebijakan, serta efektivitas program pembelajaran. Banyak komite sekolah hanya menjalankan pengawasan administratif seperti memeriksa laporan BOS tanpa melakukan evaluasi strategis terhadap dampak kebijakan pendidikan. Hal ini sesuai dengan temuan Fitriani & Hidayati (2021), yang menyebutkan bahwa pengawasan komite sering kali bersifat formal dan belum berdampak signifikan pada kualitas pembelajaran. Sebaliknya, studi Anwar & Rosyid (2019) menunjukkan bahwa komite yang terlibat aktif dalam menganalisis program pendidikan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan pembelajaran. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menuntut literasi kebijakan, akses data, dan keberanian komite untuk melakukan dialog kritis dengan pihak sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang jelas antara kualitas pengawasan komite di UPT SDN 037, SDN 036, dan SDN 044 Desa Karya Indah. Di UPT SDN 037, komite menjalankan pengawasan substantif, termasuk meminta bukti penggunaan dana, mengajukan pertanyaan kritis, dan mengikuti evaluasi program secara rutin sehingga memberikan dampak nyata terhadap akuntabilitas sekolah. Sebaliknya, di UPT SDN 036, pengawasan masih terbatas pada aspek administratif tanpa keterlibatan dalam evaluasi kebijakan pembelajaran. Di UPT SDN 044, pengawasan cenderung formalitas; komite hadir dalam rapat namun tidak memberikan masukan substantif karena keterbatasan informasi dan rendahnya respons pihak sekolah terhadap pertanyaan komite. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak cukup hanya dengan kehadiran komite, tetapi perlu didukung oleh pemahaman kebijakan, ruang dialog, dan mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Secara keseluruhan, peran pengawasan komite sekolah menunjukkan rentang kualitas yang sangat bergantung pada kapasitas komite, keterbukaan kepemimpinan sekolah, dan akses terhadap data. Ketika komite dilibatkan secara aktif, diberikan akses informasi, dan ruang dialog yang memadai, pengawasan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan sekolah. Namun, jika pengawasan hanya bersifat administratif dan formal, kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan menjadi minimal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengawasan komite perlu dilakukan melalui pelatihan literasi kebijakan, penguatan mekanisme pelaporan yang transparan, serta pemberian peran yang lebih strategis bagi komite dalam mengevaluasi kebijakan dan program pembelajaran. Dengan demikian, komite dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Peran Komite Sekolah sebagai Mediator antara Sekolah dan Masyarakat

Peran komite sekolah sebagai mediator memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dan masyarakat, terutama orang tua siswa. Sebagai lembaga yang merepresentasikan unsur sekolah dan masyarakat, komite sekolah memastikan bahwa kebijakan, program, maupun perubahan yang diterapkan sekolah dapat dipahami secara jelas oleh orang tua, serta sebaliknya, aspirasi dan keluhan masyarakat dapat disampaikan kepada pihak sekolah secara konstruktif. Peran mediasi ini menjadi sangat penting karena komunikasi yang efektif merupakan fondasi hubungan yang harmonis antara

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

sekolah dan masyarakat—suatu kondisi yang mendukung berlangsungnya pendidikan yang inklusif dan partisipatif, termasuk di daerah yang partisipasi orang tuanya masih rendah atau akses komunikasinya terbatas.

Secara teoretis, peran komite sebagai mediator sejalan dengan model keterlibatan orang tua dalam pendidikan yang dikemukakan Epstein (1995), yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan kolaborasi antara sekolah dan keluarga sebagai unsur kunci dalam peningkatan mutu pembelajaran. Dalam kerangka tersebut, komite sekolah berfungsi untuk memfasilitasi aliran informasi, baik mengenai kebijakan baru, program pembelajaran, maupun agenda sekolah, sekaligus menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, atau keberatan terkait proses pendidikan. Peran ini juga relevan dengan pendekatan penyelesaian konflik pendidikan, di mana mediasi yang terbuka dan dialogis dapat mencegah ketegangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menjaga stabilitas hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran mediasi komite berbeda pada tiga sekolah dasar di Desa Karya Indah. Di UPT SDN 037, peran mediator berjalan aktif melalui pertemuan rutin, grup komunikasi digital, serta mekanisme penyampaian dan tindak lanjut keluhan yang jelas, sehingga orang tua merasa terhubung dan lebih memahami kebijakan sekolah. Sebaliknya, di UPT SDN 036, komunikasi masih satu arah dan fungsi mediasi belum menjadi saluran utama penyelesaian persoalan sehingga orang tua lebih memilih langsung berkomunikasi dengan guru. Di UPT SDN 044, peran mediator bahkan cenderung pasif karena komite hanya menyampaikan informasi tanpa mekanisme penampungan aspirasi dan tindak lanjut yang memadai, sehingga legitimasi komite di mata masyarakat menjadi lemah.

Secara keseluruhan, peran komite sekolah sebagai mediator sangat krusial dalam menciptakan hubungan sekolah–masyarakat yang harmonis, meningkatkan partisipasi orang tua, dan membantu mencegah atau menyelesaikan konflik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada legitimasi komite di mata masyarakat, kapasitas komunikasi komite, dan keberadaan mekanisme tindak lanjut yang jelas atas setiap keluhan atau aspirasi. Untuk mengoptimalkan peran mediasi, diperlukan penguatan kemampuan komunikasi komite, dukungan dari pihak sekolah agar setiap masukan masyarakat ditangani secara serius, serta pembiasaan forum mediasi yang transparan dan responsif. Ketika ketiga aspek ini terpenuhi, komite dapat menjalankan fungsi mediator secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas hubungan sekolah dan masyarakat serta mutu pendidikan secara keseluruhan.

Dampak Keterlibatan Komite Sekolah terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Suasana Sekolah

Keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas pembelajaran, suasana sekolah, dan partisipasi masyarakat. Sebagai lembaga yang dekat dengan orang tua dan masyarakat, komite sekolah berpotensi memperkuat lingkungan belajar melalui perbaikan fasilitas, peningkatan komunikasi, dan dukungan moral kepada siswa serta guru. Secara teoritis, peran ini selaras dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Ketika komite aktif dalam mendukung kebijakan sekolah, menyampaikan aspirasi, dan membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran, maka iklim belajar menjadi lebih kondusif dan motivasi siswa meningkat. Hal ini menguatkan pandangan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi unsur kunci dalam memperbaiki mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat fungsi komite—advisory, supporting, controlling, dan mediating—berjalan dengan kualitas berbeda di tiga sekolah dasar di Desa Karya Indah. Pada fungsi advisory, sekolah yang melibatkan komite sejak penyusunan RKS mampu mengubah masukan menjadi program nyata seperti penataan ruang kelas dan pengadaan bahan bacaan, sejalan dengan mandat Kepmendiknas No. 044/U/2002. Pada fungsi supporting, dukungan yang terhubung langsung dengan kebutuhan kelas—seperti kipas angin, buku bacaan, atau alat bantu belajar—lebih berdampak daripada dukungan insidental. Pada fungsi controlling, efektivitas pengawasan meningkat ketika komite memiliki ruang bertanya, memeriksa bukti, dan menunda persetujuan sampai laporan dianggap jelas. Sementara itu, pada fungsi mediating, efektivitas sangat ditentukan oleh keberadaan kanal komunikasi yang aktif dan kecepatan tindak lanjut terhadap aspirasi orang tua. Perbedaan kualitas fungsi ini menjadi pembeda antara sekolah yang progresif dan sekolah yang masih terjebak pola prosedural.

Keempat fungsi komite ternyata saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Advisory yang kuat memungkinkan supporting menjadi lebih tepat sasaran; supporting yang jelas memudahkan controlling karena program yang diawasi terukur; controlling yang efektif memperkuat kepercayaan orang tua sehingga mediating berjalan lancar; dan mediasi yang responsif kembali memperkuat arah perencanaan sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan satu fungsi hanya mungkin terjadi jika tiga faktor kunci terpenuhi: kapasitas komite dalam memahami kebutuhan pembelajaran, keterbukaan kepala sekolah untuk berdialog secara deliberatif, serta disiplin tindak lanjut berupa notulensi yang operasional, penanggung jawab yang jelas, dan tenggat pelaksanaan. Ketika ketiga faktor ini hadir, peran komite tidak berhenti pada kehadiran simbolik, tetapi berubah menjadi kekuatan penggerak yang secara nyata mempengaruhi iklim belajar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan gradasi peran komite: UPT SDN 037 Desa Karya Indah menjalankan fungsi komite secara substantif, UPT SDN 036 Desa Karya Indah berada pada tingkat moderat, dan UPT SDN 044 Desa Karya Indah cenderung prosedural. Dampak yang paling cepat terlihat dari peran komite bukan pada capaian akademik, tetapi pada prasyarat mutu—kenyamanan kelas, kejelasan program, keterlibatan orang tua, dan meningkatnya kepercayaan publik. Perbaikan akademik biasanya muncul bertahap setelah prasyarat ini menguat. Oleh karena itu, prioritas pengembangan di sekolah yang masih lemah terletak pada penguatan kapasitas komite, pembiasaan forum dialog yang produktif, dan peningkatan disiplin tindak lanjut. Ketika tiga aspek ini diperbaiki, fungsi komite akan bergerak dari sekadar prosedural menjadi bermakna dan mampu memberikan dampak nyata terhadap mutu pendidikan di sekolah dasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, komite sekolah terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan ketika menjalankan perannya secara aktif dan substantif sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator. Peran advisory efektif ketika komite dilibatkan sejak tahap awal perencanaan dan memberikan masukan yang spesifik terhadap kebutuhan inti pembelajaran, sementara dukungan yang berkelanjutan dan terarah—baik berupa fasilitas, bahan ajar, maupun dukungan moral—menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Fungsi pengawasan berjalan optimal ketika komite memiliki akses terhadap data, ruang dialog, serta kesempatan untuk menelaah bukti dukung, sehingga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penyesuaian kebijakan yang cepat. Sebagai mediator, komite efektif apabila mampu menjembatani komunikasi dua arah antara sekolah

Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

dan masyarakat dengan respons cepat, jelas, dan solutif, sehingga membangun kepercayaan publik serta mencegah konflik yang dapat mengganggu proses pendidikan. Secara keseluruhan, sekolah yang melibatkan komite secara aktif menunjukkan peningkatan suasana belajar, partisipasi orang tua, dan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ruang lingkup yang hanya mencakup tiga sekolah dasar dalam satu desa sehingga hasilnya paling akurat untuk menggambarkan konteks lokal dan belum tentu sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke wilayah lain tanpa verifikasi tambahan. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis proses dan prasyarat mutu, sementara pengaruh langsung terhadap capaian belajar siswa belum diukur secara kuantitatif maupun jangka panjang, sehingga hubungan kausal antara peran komite dan peningkatan capaian akademik masih memerlukan penelitian lanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, S. E. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
- Agista, Rizky Shinta. 2019. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sdn 012 Tarakan."
- Alfian, M., Hasibuan, M. A., & Ratonggi, R. (2024). Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 3 Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 219–236.
- Amerta, I. Putu Eka, Sudjarwo, and Alben Ambarita. 2015. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan."
- Ansori, A., & Sinaga, S. R. (2025). Peran Komite Sekolah dalam Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Al-Anam: Journal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 8–18.
- Anwar, Saekul. 2022. "Role of the School Committee As a Mediator Between Educational Institutions and Village Communities in Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-District, Grobogan Regency."
- Bisri, A. M. (2020). Studi Analisis Komite Sekolah/Madrasah Dalam Mengawal Kualitas Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 51–64.
- Damanik, R. (2019). Pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah Dan Komite Sekolah Terhadap Mutu Sekolah. *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*, 5(1), 41–52.
- Dewi, R. K., Sari, A. F., & Rahayu, S. S. (2025). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, 11(1), 296–310.
- Harahap, N. J. (2023). *Peranan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN 101750 Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Hariyani, N. (2016). *Pengaruh kinerja komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator terhadap mutu layanan Pendidikan di SMAN Negeri Se-Kota Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hendarman, H., Saryono, D., Supriyono, S., Kamdi, W., Sunaryo, S., Latipun, L., Winarsunu, T., Chamisijatin, L., Koesoema, D., & Indriyanto, B. (2018). *Konsep dan pedoman penguatan pendidikan karakter tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama*. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan.
- Jamaluddin, H. (2022). Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Pengelolaan Pendidikan di

- Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. *NineStars Education*, 2(1), 26–40.
- Mursalim, M., & Tech, M. I. (2019). Kebijakan dan Strategi: Membangun Interkoneksi antara Pendidikan Formal, Non-Formal, dan Informal dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat di Indonesia (Makalah). *Kendari. Kendari*.
- Nurafni, K., Saguni, F., & Hasnah, S. (2022). Pengaruh Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 44–68.
- Priyatna, N. (2022). *Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD/MI/SDLB Dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah Dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD Dan SMP (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar)*. Universitas Islam Riau.
- Randan, F., Todingbua, M. A., & Buku, A. (2025). Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana/Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(2).
- Rosnani, Leni. 2021. “Peran Dan Keterlibatan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMA Tamansiswa Pematangsiantar.”
- Sari, D. P., Juliejantiningih, Y., & Maryanto, M. (2024). Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, Komitmen Guru dan Peran Komite Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 5(2), 438–447.
- Seriyanti, N., Ahmad, S., & Destiniar, D. (2021). Pengaruh kepemimpinan Kepala sekolah dan peran Komite sekolah terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis sekolah. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 6(1), 15–33.
- Winoto, Suhadi. 2021. Komite Sekolah/Madrasah Dan Manajemen Mutu Pendidikan.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

